

**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
MUARA ENIM, KOTA PALEMBANG, DAN PRABUMULIH
TAHUN 2010 – 2019**



Skripsi Oleh:
WAHYU SAMPURNA
01021381621137
EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, MUARA ENIM, KOTA
PALEMBANG, DAN PRABUMULIH TAHUN 2010 - 2019

Disusun oleh :

Nama : Wahyu Sampurna
NIM : 01021381621137
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

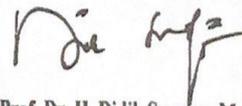
Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

Ketua

: 31 Maret 2021



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M. Si
NIP. 196007101987031003

Tanggal

Anggota

: 24 Juni 2021



Dr. Sucanto, S.E., M. Si
NIP. 197403252009121001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN SISA
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN, MUARA ENIM, KOTA PALEMBANG, DAN PRABU MULIH TAHUN
2010 - 2019

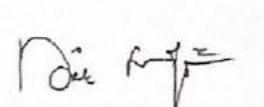
Disusun oleh

Nama Wahyu Sampurna
NIM 01021381621137
Fakultas Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi Ekonomi Keuangan Daerah

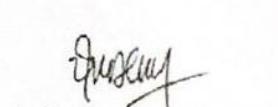
Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 9 Juli 2021 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 9 Juli 2021

Ketua Anggota Anggota


Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003


Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001


Dr. Hj. Anna Yuliantita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008032015

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


10/11/21

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN 23-11-2021
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Wahyu Sampurna
NIM : 01021381621137
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, dan Prabumulih tahun 2010 – 2019.

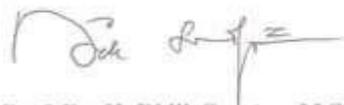
Telah kami periksa penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses-nya*, dan kami setuju untuk di tempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, Oktober 2021

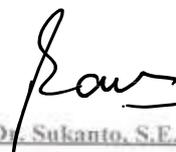
Pembimbing Skripsi

Ketua

Anggota



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP.197403252009121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Sampurna
NIM : 01021381621137
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, MUARA ENIM, KOTA
PALEMBANG, DAN PRABUMULIH TAHUN 2010 – 2019

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
Anggota : Dr. Sukanto, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 9 Juli 2021

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjana.

Palembang, 9 Juli 2021



(Wahyu Sampurna)
01021381621137

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sampai Bertemu di Titik Terbaik Menurut Takdir”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Bapak Rudi dan Ibu Sri Wahyuni*
- *Saudaraku Wisnu Nugroho*
- *Saudariku Nabila Anggraini Wijaya*
- *Para Dosen Fakultas Ekonomi Unsri*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, dan Prabumulih tahun 2010 – 2019”**, Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan guna menyempurnakan skripsi ini.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala-Nya.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rudi dan Ibu Sri Wahyuni, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, motivasi dan nasehat, serta pengorbanan tak terkira, yang tak hentinya diberikan demi kesuksesan dan kebahagiaan anakmu selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mukhlis, S.E, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Bapak Dr. Imam Asngari, S.E, M.Si, selaku Pengelola Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
6. Bapak Dr. Imam Asngari, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si dan Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran terbaik dan kritik membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E,M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran terbaik dan kritik membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membantu selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Kedua adikku tercinta, Wisnu Nugroho dan Nabila Anggraini Wijaya terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi, dan doanya yang tak terhingga selama ini.
11. Kepada sahabatku dan temanku, terimakasih untuk waktu dan sarannya selama perkuliahan dan selalu memberikan semangat dan juga doa bagi penulis dari penyusunan proposal hingga sampai skripsi ini.

12. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun semua pihak yang membutuhkan dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin.

Palembang, 04 Oktober 2021

Penulis,

(Wahyu Sampurna)

ABSTRAK

Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, dan Prabumulih tahun 2010 – 2019

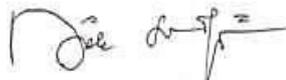
Oleh:

Wahyu Sampurna; Didik Susetyo; Sukanto

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, dan Prabumulih tahun 2010 – 2019, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahun 2010-2019. Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa variabel Pajak, Retribusi, Dana Perimbangan dan SiLPA dinyatakan signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, dan Prabumulih. Secara simultan variabel Pajak, Retribusi, Dana Perimbangan dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah t hitung > t tabel dan nilai probability < 0,05. Dan secara simultan Pajak, Retribusi, Dana Perimbangan dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah F hitung > t tabel dan nilai probability < 0,05.

Kata Kunci : *Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Belanja Daerah.*

Ketua,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Anggota,



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

ABSTRACT

The Effect Of Regional Taxes and Retribution, Balance Fund, and Surplus Of Budget Financing On The Expenditure Of Musi Banyuasin District, Muara Enim, Palembang City, and Prabumulih In 2010 – 2019

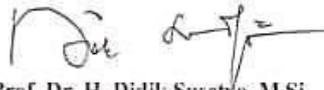
By:

Wahyu Sampurna; Didik Susetyo; Sukanto

This study aims to analyze the effect of Regional Taxes and Retribution, Balancing Funds, and Surplus Of Budget Financing on The Expenditure of Musi Banyuasin Regency, Muara Enim, Palembang City, and Prabumulih in 2010-2019. The research method used in quantitative and qualitative descriptive research. The data used in this study is secondary data from 2010-2019. Based on the results, it can be seen that the variables of Tax, Retribution, Balancing Funds and SiLPA are stated to be significant to the Regional Government Expenditures of Musi Banyuasin, Muara Enim, Palembang City, and Prabumulih. Simultaneously, the variables of Tax, Retribution, Balancing Fund and SiLPA have a significant effect on Regional Expenditure t count > t table and probability value < 0.05. And simultaneously Tax, Retribution, Balancing Funds and SiLPA have a significant effect on Regional Expenditures F count > t table and probability value < 0.05.

Keywords : *Regional Taxes and Retribution, Balancing Funds, Surplus Of Budget Financing (SiLPA), Regional Expenditure*

Chairman,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Member,



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

Approved by,
Head Of The Economic Development



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyu Sampurna

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 04 Oktober 1998

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : Jl. Mayor Zurbi Bustan, No.3646, Palembang, Sumatera Selatan.

Alamat E-Mail : sampurnawahyu@yahoo.co.id

Telpon : 081368696110

Pendidikan Formal

SD : SDN 147 Palembang (Lulus 2010)

SMP : SMP Negeri 26 Palembang (Lulus 2013)

SMA : SMA Negeri 17 Palembang (Lulus 2016)



DAFTAR ISI

ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Belanja Daerah	11
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	14
2.1.2.1 Pengeluaran Daerah	19
2.2 Pajak Daerah.....	20
2.3 Retribusi Daerah.....	21
2.3.1 Hasil Pengelolaan Kekayaan dan Hasil Perusahaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD sah.....	21
2.4 Otonomi Daerah	22
2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	23
2.6 Dana Perimbangan.....	24
2.6.1 Dana Bagi Hasil / DBH.....	25
2.6.2 Dana Alokasi Umum / DAU	26
2.6.3 Dana Alokasi Khusus / DAK	27
2.7 SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)	27
2.8 Penelitian Terdahulu.....	28
2.9 Kerangka Pikir.....	30
2.10 Hipotesis	31

BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	32
3.2 Jenis dan Sumber Data	33
3.3 Variabel Penelitian	33
3.4 Teknik Analisis.....	36
3.4.1 Permodelan Data Panel	36
3.4.2 Pemilihan Model Akhir.....	37
3.4.3 Regresi Linier Berganda	39
3.4.4 Koefisien Determinasi.....	39
3.4.5 Uji Hipotesis.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Letak Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....	43
4.1.2 Tingkat Pertumbuhan Dua Kabupaten dan Dua Kota.....	44
4.1.3 Rata-rata Belanja Daerah, Pajak, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA	45
4.1.4 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	47
4.1.4.1 Estimasi Model Regresi Data Panel dengan Metode <i>Common Effect Model</i>	47
4.1.4.2 Estimasi Model Regresi Data Panel dengan Metode <i>Fixed Effect Model</i>	48
4.1.4.3 Estimasi Model Regresi Data Panel dengan Metode <i>Random Effect Model</i>	49
4.1.4.4 Uji Chow.....	50
4.1.4.5 Uji Hausman	50
4.1.4.6 Uji Langrange Multiplie (LM)	51
4.1.4.7 Pemilihan Model Akhir.....	52
4.1.5 Hasil Pengujian Statistik	54
4.1.5.1 Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F).....	54

4.1.5.2	Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	56
4.1.5.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	57
4.2	Pembahasan	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		61
5.1	KESIMPULAN	61
5.2	SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN.....		66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, Prabumulih dan Provinsi. Sumatera Selatan tahun 2014 dan 2019	3
Tabel 1.2	Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, Prabumulih, dan Prov. Sumatera Selatan tahun 2014 dan 2019	8
Tabel 4.1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Belanja Daerah, Pajak, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA Tahun 2010-2019.....	45
Tabel 4.2	Rata-rata Belanja Daerah, Pajak, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA Tahun 2010-2019.....	46
Tabel 4.3	Hasil Regresi Menggunakan Metode Common Effect.....	47
Tabel 4.4	Hasil Regresi Menggunakan Metode Fixed Effect.....	48
Tabel 4.5	Hasil Regresi Menggunakan Metode Random Effect Model.....	49
Tabel 4.6	Hasil Regresi Menggunakan Uji Chow	50
Tabel 4.7	Hasil Regresi Menggunakan Uji Hausman	51
Tabel 4.8	Hasil Regresi Menggunakan Langrange Multiplie (LM)	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kurva Pengeluaran Pemerintah menurut Teori Peacock dan Wiseman	16
Gambar 2.2	Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner	17
Gambar 2.3	Kerangka Pikir	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang, pemerintahnya memiliki peran penting guna untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai pembangunan ekonomi tersebut.

Kebijakan fiskal merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin di dalam dokumen APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk wilayah nasional dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk wilayah regional atau daerah (Hariyanto, 2006).

Tata cara penyusunan dan implementasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) memiliki berbagai macam permasalahan, salah satunya dalam pengalokasian sumber-sumber pendapatan daerah yang diperuntuhkan untuk kepentingan publik, baik dalam alokasi dana untuk belanja langsung maupun belanja tak langsung. Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik kepada masyarakat harus berdasarkan azas desentralisasi. Kepala daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau

dikenal dengan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD (Tuasikal, 2008).

Menurut Cardiman (2006), pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah, hal ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dalam pengambilan keputusan pengeluaran sektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat, yang terdiri dari dana perimbangan termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain dana perimbangan pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan Lain-lain Pendapatan.

Kebijakan desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Kebijakan desentralisasi telah menjadi pilihan baik di negara maju maupun negara berkembang dalam menjalankan kebijakan ekonominya tidak terkecuali di Indonesia. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di berbagai sektor terutama pada sektor publik (Haryanto, 2005).

Halim (2001) mengatakan untuk menuju kemandirian daerah yang baik, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik di daerah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam

meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Tabel 1.1 Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, Prabumulih dan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 dan 2019

(dalam juta rupiah)

Kabupaten/Kota	Pajak Daerah		Pendapatan Asli Daerah		Dana Perimbangan	
	2014	2019	2014	2019	2014	2019
Musi Banyuasin	61.581	69.943	41,061	286.594	1,016,000	3.103.333
Muara Enim	47.806	139.778	88,207	303.296	1,959,000	2.155.493
Palembang	463.574	832.056	458,534	1.081.114	1,171,000	1.968.123
Prabumulih	18.822	30.189	26,877	100.975	483,288	861.874
Sumatera Selatan	2.267.779	3.145.558	2.422.673	3.494.510	2.982.866	5.698.701

Sumber : djk.kemenkeu.go.id, tahun 2020

Tabel 1.1 di Sumatera Selatan terlihat mencakup Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah, data tersebut memiliki kenaikan yang baik dari tahun 2014 ke 2019. Dalam hal ini daerah Kabupaten Muara Enim memiliki Pajak Daerah sebesar Rp. 47.806.000.000,- tahun 2014 dan tahun 2019 sebesar Rp. 139.778.000.000,- yang memiliki kenaikan yang tinggi. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2014 sebesar Rp. 88.207.000.000,- dan tahun 2019 sebesar Rp. 303.296.000.000,- yang memiliki kenaikan yang tinggi dibandingkan Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam hal ini pemerintah seharusnya bisa melihat dan meningkatkan kemandirian daerah dan bisa mengoptimalkan potensi

pendapatan daerah yang ada pada daerah tersebut agar bisa melakukan pembangunan pada sektor produktifnya.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat. Pola hubungan yang cenderung sentralisasi ini berubah pada pola desentralisasi yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur daerahnya.

Kebijakan desentralisasi selanjutnya adalah kebijakan otonomi daerah, kebijakan otonomi daerah ini lahir karena melihat perkembangan kondisi dalam negeri yang menunjukkan keinginan dari rakyat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Adapun kondisi dunia secara global mengidendikasi semakin kuatnya arus globalisasi yang tentunya menuntut adanya daya saing yang kuat dari tiap negara. Upaya penguatan daya saing negara secara umum dapat dicapai bila pemerintah daerahnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Adanya otonomi daerah berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga dalam bentuk finansial. Meski demikian pemerintah pusat tetap memberikan dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum yang di transfer ke pemerintah daerah. Dana perimbangan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 sebesar 2.982 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2019 sebesar

5.698 juta rupiah. Dari Tabel 1.1 diketahui dana perimbangan terbesar pada tahun 2014 adalah Kabupaten Muara Enim dan 2019 terdapat pada Kabupaten Musi Banyuasin. Program otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Menurut Mardiasmo (2002), bahwa otonomi daerah merupakan suatu transformasi paradigma dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab agar hasilnya dapat diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi di daerah tersebut. Tujuan utama melaksanakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Panggabean (2009) menyatakan bahwa konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam mewujudkan otonomi daerah.

Akan tetapi ada fakta lain, bahwa daerah tidak akan mampu membiayai pengeluarannya, baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung jika hanya mengandalkan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dengan pemberian bantuan untuk keuangan pemerintah daerah dengan dana perimbangan (Haryanto, 2005).

Salah satu faktor terpenting dalam menjalankan roda perekonomian suatu daerah adalah peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai segala macam belanja pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diperoleh dengan menggali segala potensi yang ada di daerah tersebut guna menunjang laju perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan suatu daerah agar memiliki perekonomian yang kuat, mampu tumbuh dan berkesinambungan, dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan dan produktif yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sari, 2016).

Pendapatan Asli Daerah sendiri merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah terhadap bantuan pemerintah

pusat. Adapun menurut (Mardiasmo, 2002) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain–lain pendapatan asli daerah.

Pengertian PAD dapat juga dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya (Sari, 2016).

Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah-daerah untuk memberikan pembiayaan kebutuhan daerah tersebut. Dana Perimbangan bisa dikatakan atau biasa disebut dana transfer. Tujuan dana transfer adalah a). mengurangi keuangan horizontal antar daerah, b). mengurangi kesenjangan vertikal Pusat dan Daerah, c). mengatasi persoalan efek pelayanan publik tiap daerah, dan d). untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Dana perimbangan diberikan untuk membantu daerah dalam mengatasi ketimpangan pendanaan di daerah. Dana perimbangan diberikan kepada daerah dengan melihat potensi, keadaan/kondisi, dan kebutuhan daerah tersebut. Dana perimbangan antara pusat dan daerah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari sistem keuangan negara (Rahmawati, 2010).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau yang biasa disebut SiLPA, yaitu selisih lebih realisasi pengeluaran dan penerimaan selama satu periode anggaran. SiLPA APBD ialah selisih lebih antara realisasi pendapatan, Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode laporan.

Belanja Daerah yaitu semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 Tahun 2004). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Tabel 1.2 Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, Prabumulih, dan Prov. Sumatera Selatan tahun 2014 dan 2019

(dalam juta rupiah)

Kabupaten/Kota	Belanja Daerah		Pendapatan Asli Daerah		Dana Perimbangan	
	2014	2019	2014	2019	2014	2019
Musi Banyuasin	3.517.904	3.647.212	41,061	286.594	1,016,000	3.103.333
Muara Enim	1.783.781	2.992.193	88,207	303.296	1,959,000	2.155.493
Palembang	2.812.465	3.968.206	458,534	1.081.114	1,171,000	1.968.123
Prabumulih	927.133	468.550	26,877	100.975	483,288	861.874
Sumatera Selatan	5.781.570	9.618.074	2.422.673	3.494.510	2.982.866	5.698.701

Sumber : djk.kemenkeu.go.id, tahun 2020

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Belanja Daerah antara 2 kabupaten dan 2 kota masing-masing berbeda antara satu dengan yang lainnya. Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 3.517 juta rupiah yang tertinggi pada tahun 2014, dan di Kota Palembang sebesar 3.968 juta rupiah yang tertinggi pada tahun

2019. Belanja daerah ialah berupa seluruh pengeluaran pemerintah daerah dalam satu anggaran berisikan biaya yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan program kerja pemerintah.

Belanja daerah pun memiliki komposisi yang harus diperhatikan sebaik-baiknya untuk menunjang kebutuhan fasilitas publik supaya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya. Ketika rasa percaya masyarakat meningkat maka akan dapat membuat meningkatnya kontribusi masyarakat dalam membayar pajak, yang tentunya itu merupakan salah satu dari pendapatan asli daerah. Dari latar belakang diatas saya akan membahas penelitian mengenai “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, dan Prabumulih tahun 2010 – 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, dan Prabumulih tahun 2010 - 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, dan Prabumulih tahun 2010 – 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi ilmiah bagi akademisi khususnya ilmu ekonomi untuk menambah dan memperkaya bahan kajian teori-teori bagi peneliti selanjutnya.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi pemerintahan tentang Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, dan Prabumulih, dan dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah tersebut.
- b. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sebagai masukan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agniezka, K. (2017). Local Governments Revenue and Expenditure Autonomy as a Determinant of Local Public Spending on culture. An Analysis for Polish Rural Municipalities. *Journal of Multidisciplinary Studies Faculty of Economic Science, University of Warsaw.*, Vol. 5 No.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2019). *Sumsel Dalam Angka tahun 2019*.
- Basri, Zainal, dan Y. S. M. (2003). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Cardiman. (2006). *Strategi Alokasi Belanja Publik Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Indonesia. (n.d.). *APBD Tahun 2010-2019*.
- Eka Maria, N. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota Bandung*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi Keti). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2012). *Ekonometrika Dasar*. Erlangga.
- Halim, A. (2001). *Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. 127–146.
- Hariyanto, R. (2006). *Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Propinsi Jawa Tengah Periode 2000-2002*.
- Haryanto, J. (2005). Analisis Hubungan Antar Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin. *Kajian Ekonomi, Vol. 4*, 56 – 80.
- Kasdy, L. M., Nadirsyah, N., & Fahlevi, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10916>
- Maimunah, M. (2006). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*.
- Mangkoesebroto, G. (1993). *Ekonomi Publik*. BPFPE.

- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Mentayani, I. R. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan*. 9(2), 91–102.
- Mustopadidjaya, A. (1997). *Sistem dan Proses Penyusunan APBDN, Modul pada Program Diklat TMPP-D Angkatan XV*.
- Nurlis. (2016). The Factors Affecting of The Capital Expenditure Allocation Case : The Local Government of Indonesia. *Journal of Finance and Accounting.*, Vol. 7, No, Hal. 2222-1697.
- Panggabean, H. E. H. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir*.
- Rahmawati, M. F. C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas BSI, Bandung*.
- Rahmawati, N. I. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. 1–29.
- Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Jurnal Universitas Indonesia (Kajian Kontekstual Indonesia)*.
- Sabir. (2013). Local Government Expenditure, Economic Growth and Income Inequality in South Sulawesi Province. *Journal of Applied Economics and Business University of Hasanuddin. Indonesia*.
- Sari, L. N., Susetyo, D., & Saleh, M. S. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Kredit Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2015*. 14(1), 1–7.
- Susetyo, D. (2008). *Ekonomi Pembangunan Kinerja APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*. 39–53.
- Susi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala*.

Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), 142–154.

Zahari, M. M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *Journal of Economics and Business.*, Vol. 1 No.